



KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 67/KEPMEN-KP/2018
TENTANG
PENETAPAN PELABUHAN PERIKANAN MUARA SUNGAI BATURUSA SEBAGAI
PELABUHAN PERIKANAN PANTAI MUARA SUNGAI BATURUSA, KOTA
PANGKAL PINANG, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung operasional Pelabuhan Perikanan Muara Sungai Baturusa serta pelaksanaan Pasal 24 ayat (6) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan, perlu menetapkan Pelabuhan Perikanan Muara Sungai Baturusa, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Pelabuhan Perikanan Pantai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penetapan Pelabuhan Perikanan Muara Sungai Baturusa Sebagai Pelabuhan Perikanan Pantai Muara Sungai Baturusa, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 440);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN PELABUHAN PERIKANAN MUARA SUNGAI BATURUSA SEBAGAI PELABUHAN PERIKANAN PANTAI MUARA SUNGAI BATURUSA, KOTA PANGKAL PINANG, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

KESATU : Menetapkan Pelabuhan Perikanan Muara Sungai Baturusa Sebagai Pelabuhan Perikanan Pantai Muara Sungai Baturusa, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

KEDUA : Pelabuhan Perikanan Pantai Muara Sungai Baturusa, sebagaimana dimaksud diktum KESATU, pengelolaannya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Muara Sungai Baturusa, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, wajib menyampaikan laporan kegiatan pelabuhan perikanan setiap bulan kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juni 2018

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan
Organisasi,

Tini Martini

